

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi dan informasi semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah harus lebih terbuka akan pentingnya suatu informasi yang jelas kepada masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang dalam harus dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, dalam hal ini OPD harus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah menghasilkan suatu laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya serta dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih Wati, dkk (2014). Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan kearah yang lebih baik lagi. Adapun faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain yaitu pemahaman standar akuntansi (SAP), Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal audit.

Menurut Sari, dkk (2014) belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan).

Selain pemahaman terhadap SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah internal audit/inspektorat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Diharapkan dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mempunyai nilai dan bebas dari kesalahan yang material, hal ini akan terwujud apabila ada peran internal audit dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2014) menemukan bahwa pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artana (2016), mengatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010), mengatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Diani (2014), mengatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) mengatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) mengatakan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2015) peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak”. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak karena untuk kali kedua, Pemkab Demak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Rekomendasi yang diberikan BPK sangat bermanfaat bagi kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Demak. Dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan, tindak lanjut rekomendasi yang berarti membuktikan keseriusan Pemkab Demak untuk memperbaiki tata kelola keuangan dengan memperoleh Opini WTP 2016 dan 2017. Dijelaskan terdapat empat unsur penilaian untuk memperoleh

penghargaan Opini WTP, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini WTP merupakan bukti bahwa laporan keuangan Kabupaten Demak sudah baik dan akuntabel. Penghargaan Opini WTP bagi Kabupaten Demak diharapkan dapat dipertahankan dengan kualitas yang semakin baik. (Suara merdeka, 2018)

1.2. Ruang Lingkup

Begitu luasnya pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka untuk menghindari adanya kesalahan, dimana ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah berikut ini:

1. penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Ojek penelitian ini pada organisasi perangkat sdaerah (OPD) Kabupaten Demak.

1.3. Perumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimana pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisa pengaruh dari pemanfaatan sistem infoormasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisa pengaruh dari internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah khususnya satuan kerja perangkat daerah sebagai alat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas serta kinerjanya dalam penyajian laporan keuangan.

